



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL

UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SAPTOYO**
2. Jabatan : **INSPEKTUR DAERAH**
3. NHK : **635325**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.910.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/56 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 279 m2/120 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 670.000.000
3. Tanah Seluas 899 m2 di KAB / KOTA BANTUL, Rp. 900.000.000
4. Tanah Seluas 380 m2 di KAB / KOTA BANTUL, Rp. 85.000.000
5. Tanah Seluas 1.041 m2 di KAB / KOTA BANTUL, Rp. 230.000.000
6. Tanah Seluas 559 m2 di KAB / KOTA BANTUL, Rp. 120.000.000
7. Tanah Seluas 1.149 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/85 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 171.900.000**

1. MOTOR, HONDA VERZA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000
3. LAINNYA, POLYGON SPORT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 400.000



4. MOTOR, YAMAHA ALL NEW AEROX C Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
5. MOBIL, HONDA JAZZ GEB 1,5 E MT (CKD) Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 73.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 435.716.158

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.590.616.158

III. HUTANG Rp. 174.534.845

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.416.081.313

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.